

Editor:

Dra Mariyam, Ak. MSi., C.A



BUNGA RAMPAI ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN PUSAT

Assyifa Mutiara | Farel Haikhal Ferisli | Putri Dwi Lestari | Rizka Maisti Wardani
Syifani Ashira | Annisa | Ester Asi Rohana Turnip | Avriany Saragih
Isabella Widya Simatupang | Tria Khairuna | Alfin Mahira Azfah Citra Andranida
Suci Indri Wijayanti | Tri Nanda Zega | Vira Aulia Fitriani
Muhammad Akbar Tarigan | Muhammad Dhafaruddin | Nurfatimah Nasution
Talitha Saphira Zahiroh | Yudha Handiata Hutabarat | Anisa Prameisela
Dewi Shinta | Febrina Damanik | Mira Rizkianti Pelawi | M. Tahta Riva Afghan
Anisyah Lumban Gaol | Indra Irwansyah | Mailani Fransiska
Rovita Br Sitepu | Yuliati Tambunan

BUNGA RAMPAI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT

Assyifa Mutiara | Farel Haikhal Ferisli | Putri Dwi Lestari
Rizka Maisti Wardani | Syifani Ashira | Annisa
Ester Asi Rohana Turnip | Avriany Saragih
Isabella Widya Simatupang | Tria Khairuna | Alfin Mahira
Azfah Citra Andranida | Suci Indri Wijayanti
Tri Nanda Zega | Vira Aulia Fitriani
Muhammad Akbar Tarigan | Muhammad Dhafaruddin
Nurfatimah Nasution | Talitha Saphira Zahiroh
Yudha Handiata Hutabarat | Anisa Prameisela
Dewi Shinta | Febrina Damanik | Mira Rizkianti Pelawi
M. Tahta Riva Afghan | Anisyah Lumban Gaol
Indra Irwansyah | Mailani Fransiska
Rovita Br Sitepu | Yuliati Tambunan



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA RAMPAI

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT

Penulis:

Assyifa Mutiara | Farel Haikhal Ferisli | Putri Dwi Lestari | Rizka Maisti Wardani
Syifani Ashira | Annisa | Ester Asi Rohana Turnip | Avriany Saragih
Isabella Widya Simatupang | Tria Khairuna | Alfin Mahira Azfah Citra Andranida
Suci Indri Wijayanti | Tri Nanda Zega | Vira Aulia Fitriani
Muhammad Akbar Tarigan | Muhammad Dhafaruddin | Nurfatimah Nasution
Talitha Saphira Zahiroh | Yudha Handiata Hutabarat | Anisa Prameisela
Dewi Shinta | Febrina Damanik | Mira Rizkianti Pelawi | M. Tahta Riva Afghan
Anisyah Lumban Gaol | Indra Irwansyah | Mailani Fransiska
Rovita Br Sitepu | Yuliati Tambunan

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dra Mariyam, Ak. MSi., C.A

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

vi, 126, Uk: 15,5 X 23 cm

QRCBN: 62-415-3817-776

Cetakan Pertama:

Juli 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

Copyright © 2024 By Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang Keras Menerjemahkan, Memfotokopi, Atau
Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota Ikapi (216/Jte/2021)

PRAKATA

Syukur alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah memberi kekuatan kepada penulis untuk merampungkan buku ini bersama tim mahasiswa sehingga selesai pada waktunya.

Buku ini dibuat untuk memberi contoh bagaimana membuat analisis laporan keuangan pusat dan daerah yang dimulai dengan berbekal laporan keuangan pusat dan daerah yang audited pada tahun tertentu dengan menggunakan peraturan yang telah berlaku.

Terima kasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dan penerbitan buku ini.

Semoga buku dapat diterima dan bermanfaat untuk semua pembaca baik kalangan akuntansi dan masyarakat indonesia pada umumnya. Penulis mohon maaf apabila ada yang tidak sempurna dalam buku ini, semoga dapat lebih baik lagi untuk penulisan selanjutnya.

Penulis

BAB 5 ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....	89
A. Analisis Kasus	89
B. Analisis Kinerja Pendapatan Daerah	91
C. Analisis Kinerja Belanja Daerah	94
D. Analisis Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kota Depok	97
E. Analisis Laporan Realisasi APBD Yang Menyangkut Analisis Belanja Daerah, Pendapatan, Dan Pembiayaan	100
F. Analisis Laporan Realisasi APBD Yang Menyangkut Analisis Pendapatan Dan Belanja Daerah	101
G. Analisis Laporan Realisasi APBD Yang Menyangkut Analisis Pendapatan	103
H. Analisis Laporan Realisasi APBD Yang Menyangkut Analisis Belanja...	104
BAB 6 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT	
TAHUN 2022	107
A. Pendahuluan	107
B. Analisis	119
C. Evaluasi Terhadap Laporan Realisasi Anggaran.....	121
D. Evaluasi Terhadap Neraca	122
E. Evaluasi Terhadap Arus Kas.....	124
DAFTAR PUSTAKA.....	125



BAB 1

ANALISIS PEMBIAYAAN

Disusun oleh:

Assyifa Mutiara
Farel Haikhal Ferisli
Putri Dwi Lestari
Rizka Maisti Wardani
Syifani Ashira



BAB 1 ANALISIS PEMBIAYAAN

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dalam bentuk laporan keuangan. Pada Laporan Realisasi Anggaran khususnya pada komponen pembiayaan memberikan informasi mengenai keputusan pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagi pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, informasi pembiayaan sangat penting untuk menilai apakah kebijakan/keputusan pembiayaan yang dilaksanakan pemerintah sudah berjalan dengan tepat dan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah. Struktur pembiayaan juga dapat menggambarkan rentan tidaknya keuangan daerah yang pada akhirnya berpengaruh pada tingkat risiko daerah. Penting untuk memastikan bahwa struktur pembiayaan seimbang dan berkelanjutan untuk mendukung pembangunan dan keberlanjutan fiskal. Bab ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana menganalisis dan menginterpretasikan informasi pembiayaan dan cara melaksanakan penilaian sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

B. PENGERTIAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Pembiayaan (*financing*) adalah adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Secara umum, dalam *International Public Sector Accounting Standar* (IPSAS), istilah pembiayaan dijelaskan dalam pengaturan tentang Laporan Arus Kas, dimana “Aktivitas Pembiayaan diartikan sebagai suatu aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam ukuran atau komposisi modal disetor dan pinjaman.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Secara skematis, pembiayaan dapat diilustrasikan sebagai berikut :



C. PEMBIAYAAN DALAM STRUKTUR APBD

Sebagai ilustrasi, berikut contoh struktur pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah:

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2022	ALISASI TAHUN 2022	ISIH ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI		ALISASI TAHUN 2021
				(%)	
PENDAPATAN	2.827.398.879,58 9	2.869.130.120.905,73	41.731.241.316,73	1,48%	2.278.259.847.18 9,69
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	849.736.239.925	729.192.890.114	(120.543.349.811)	5,81%	726.884.839.883, 20
Belanja Barang dan Jasa	1.218.116.278.79 3	1.066.085.071.252,51	(152.031.207.267, 49)	87,52 %	861.598.601.051, 47
Belanja Subsidi	0	0	0	0	1.000.000.000
Belanja Hibah	171.806.924.418	113.545.506.577	(58.261.417.841)	6,09%	154.568.055.061, 29
Bantuan Sosial	8.352.000.000	7.102.120.400	(1.249.879.600)	5,03%	0
Jml Belanja Operasi	2.248.011.443.13 6	1.915.925.588.616,51	(332.085.854.519, 49)	5,23%	1.744.051.495.99 5,96
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	85.610.169.390	23.282.042.475,75	(62.328.126.914,2 5)	27,20 %	35.239.770.035
Belanja Peralatan dan Mesin	178.935.304.631	168.999.424.128,37	(9.935.880.502,63)	94,45 %	114.033.857.555, 47
Belanja Gedung dan Bangunan	182.805.624.864	146.751.690.297,75	(36.053.934.566,2 5)	8%	88.348.287.769,2 3
Belanja Jalan,Irigasi, dan Jaringan	501.387.720.237	434.663.834.222,99	(66.723.886.014,0 1)	9%	300.569.672.995, 92
Belanja Aset Tetap Lainnya	26.268.196.940	22.249.635.310,26	(4.018.561.629,74)	0%	7.509.887.140
Jml Belanja Modal	975.007.016.062	946.626.435,12	(.060.389.626,88)	3%	701.475.495,62
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	11.396.064	26.006.109,37	(85.389.954,63)	0%	68.846.303,70
Jml Belanja Tak Terduga	11.396.064	26.006.109,37	(85.389.954,63)	0%	68.846.303,70
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bantuan Keuangan	0	0	0	0	0
Jumlah Tranfer	0	0	0	0	0
TOTAL BELANJA	3.129.855.262	5.398.221.161	(731.634.101)	8%	5.021.817.795,28
SURPLUS/ DEFISIT	(.730.975.673)	731.899.744,73	(.462.875.417,73)	(76%)	(761.970.605,59)

Saldo Kas Bos Tahun Sebelumnya	7.5.5.D.2.3	87.748.008,29	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		118.655.371.782,10	124.752.407.903,87
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.D.3	(187.714.166,39)	(62.374.844,06)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	7.5.5.E	(144.354.387.842,15)	(99.741.220.985,21)
Saldo Awal Kas Daerah	7.5.5.F	214.588.732.686,76	314.329.953.644,97
Saldo Akhir Kas Daerah	7.5.5.G	70.234.344.844,61	214.588.732.686,76
Saldo Kas Daerah Terdiri dari:	7.5.5.H		
Kas di BUD		2.248.517.285,91	136.412.137.837,72
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	960.267,00
Kas di BLUD		67.450.445.058,05	76.429.132.161,67
Kas di FKTP		0,00	280.417.995,00
Kas BOS		292.548.004,65	1.260.741.349,37
Saldo Akhir Kas yang Dibatasi Penggunaannya		242.834.496,00	205.343.076,00
Saldo Akhir Kas		70.234.344.844,61	214.588.732.686,76

C. ANALISIS

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut diatas, maka dihitung perkembangan kinerja keuangan dua tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 4. Neraca

No.	Uraian	Ref	2022	2021	Selisih	Dalam %
1	<u>ASET</u>					
2	ASET LANCAR	7.5.3.A				
3	Kas Di Kas Daerah	7.5.3.A.1	2.248.517.285,91	136.412.137.837,72	-134.163.620.551,81	-98,35%
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran	7.5.3.A.2	0,00	0,00	0,00	
5	Kes Di Bendahara Penerimaan	7.5.3.A.3		960.267,00	(960.267,00)	- 100,00 %
6	Kas Di BLUD	7.5.3.A.4	67.450.445.058,05	76.429.132.161,67	(8.978.687.103,62)	-11,75%
7	Kas Di FKTP	7.5.3.A.5		280.417.995,00	(280.417.995,00)	- 100,00 %
8	Kas Di BOS	7.5.3.A.6	292.548.004,65	1.260.741.349,37	(968.193.344,72)	-76,80%
9	Kes Lainnya	7.5.3.A.7	19.732.525,00	11.924.154,78	7.808.370,22	65,48%
10	Setara Kas	7.5.3.A.8	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Kas yang dibalasi pcriggunaannye	7.5.3.A.9	242.834.496,00	205.343.076,00	37.491.420,00	18,26%
12	Piutang Pajak Daerah	7.5.3.A.10	14.568.066.052,00	12.086.559.991,00	2.481.506.061,00	20,53%
13	Piutang Retribusi Daerah	7.5.3.A.11	2.805.763.349,00	2.436.388.258,00	369.375.091,00	15,16%

14	Piutang Transfer Antar Daerah	7.5.3.A.12	9.586.158.400,00	8.259.839.108,00	1.326.319.292,00	16,06%
15	Beban Di Bayar Di Muka	7.5.3.A.13	473.529.093,51	833.932.418,72	(360.403.325,21)	-43,22%
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian	7.5.3.A.14	114.500.000,00	11.250.000,00	103.250.000,00	917,78 %
17	Piutang Lainnya	7.5.3.A.15	21.145.351.177,54	10.190.617.240,77	10.954.733.936,77	107,50 %
18	Penyisihan Piutang	7.5.3.A.16	(8.971.997.916,38)	(2.720.122.432,83)	(6.251.875.483,55)	229,84 %
19	Persediaan	7.5.3.A.17	153.467.446.518,63	135.145.925.419,42	18.321.521.099,21	13,56%
20	Jumlah aset lancar		263.429.844.043,91	367.295.046.844,62	(103.865.202.800,71)	- 28,28%
2 I	INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.3.B				
22	Investasi Non Permanen	7.5.3.B.1				
23	Investasi Non Permanen Lainnya	7.5.3.B.1.1	17.861.989.250,00	17.861.989.250,00	0,00	0,00%
24	Penyisihan Kerugian Karena Penurunan Nilai	7.5.3.B.1.2	(2.779.400.000,00)	(2.779.400.000,00)	0,00	0,00%
25	Jumlah Investasi Non Permanen		15.082.589.250,00	15.082.589.250,00	0,00	0,00%
26	Investasi Permanen	7.5.3.B.2				
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.3.B.2.1	61.599.115.313,00	60.217.766.922,08	1.381.348.390,92	2,29%
28	Jumlah Investasi Permanen		61.599.115.313,00	60.217.766.922,08	1.381.348.390,92	2,29%
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang		76.641.704.563,55	75.300.356.172,00	1.341.348.391,55	1,78%
30	ASET TETAP	7.5.3.C.				

31	Tanah	7.5.3.C.1	670.324.349.916,69	671.936.830.916,69	(1.612.481.000,00)	-0,24%
32	Peralatan & Mesin	7.5.3.C.2	753.316.974.220,54	662.719.266.899,70	90.597.707.320,84	13,67%
33	Gedung & Bangunan	7.5.3.C.3	1.209.850.018.604,85	1.154.986.794.069,6 2	54.863.224.535,23	4,75%
3't	Jalan, Irigasi & Jaringan	7.5.3.C.4	2.478.628.449.091,56	2.365.391.130.817,4 5	113.237.318.274,11	4,79%
35	Aset Tetap Lainnya	7.5.3.C.5	101.939.152.294,55	95.681.411.070,55	6.257.741.224,00	6,54%
3fi	Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.3.C.6	8.124.243.890,00	23.250.374.924,00	(15.126.131.034,00)	-65,06%
37	Akumulasi Penyusutan	7.5.3.C.7	(2.070.167.766.172,9 0)	(1.837.229.456.098, 83)	(232.938.310.074,07)	12,68%
38	Jumlah Aset Tetap		3.152.015.421.845,29	3.136.736.352.599,1 8	15.279.069.246,11	0,49%
39	DANA CADANGAN	7.5.3.D				
40	Dana Cadangan	7.5.3.D.1	10.660.107.402,23	10.345.862.473,44	314.244.928,79	3,04%
41	Jumlah Dana Cadangan		10.660.107.402,23	10.345.862.473,44	314.244.928,79	3,04%
42	ASET LAINNYA	7.5.3.E				
43	Aset Tidak Berwujud	7.5.3.E.1	17.907.326.264,00	17.862.361.154,00	44.965.110,00	0,25%
44	Aset Lain-lain	7.5.3.E.2	250.090.431.597,51	210.659.214.936,42	39.431.216.661,09	18,72%
45	Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan	7.5.3.E.3	(62.842.330.469,39)	(49.063.350.103,33)	(13.778.980.366,06)	28,08%
46	Jumlah Aset Lainnya		205.155.427.392,12	179.458.225.987,09	25.697.201.405,03	14,32%
47	JUMLAH ASET		3.707.902.505.247,10	3.778.135.844.076,4 1	(70.233.338.829,31)	-1,86%
48	KEWAJIBAN	7.5.3.F				
49	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.3.F.1				

50	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.3.F.1.1	49.981.107,00	187.583.216,81	(137.602.109,81)	-73,36%
51	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-PP	7.5.3.F.1.2	21.229.282.428,00	21.229.285.826,75	(3.398,75)	0,00%
52	Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.3.F.1.3	146.306.800,00	11.848.916,00	134.457.884,00	1134,77 %
53	Utang Belanja	7.5.3.F.1.4	41.711.601.764,68	0,00	41.711.601.764,68	
54	Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.3.F.1.5	0,00	16.867.640.949,14	(16.867.640.949,14)	- 100,00 %
55	Kewajiban-Penerimaan kas yang belum Teridentifikasi Kepemilikan	7.5.3.F.1.6	242.834.496,00	205.343.076,00	37.491.420,00	18,26%
56	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		63.380.006.595,68	38.501.701.984,70	24.878.304.610,98	64,62%
57	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	7.5.3.F.2				
58	Utang Dalam Negeri — PP	7.5.3.F.2.1	40.876.606.144,00	62.105.885.173,25	(21.229.279.029,25)	-34,18%
59	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		40.876.606.144,00	62.105.885.173,25	(21.229.279.029,25)	- 34,18%
60	JUMLAH KEWAJIBAN		104.256.612.739,68	100.607.587.157,95	3.649.025.581,73	3,63%
61	EKUITAS	7.5.3.G				
62	JUMLAH EKUITAS		3.603.645.892.507,42	3.677.528.256.918,46	(73.882.364.411,04)	-2,01%
63	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.707.902.505.247,10	3.778.135.844.076,00	(70.233.338.828,90)	-1,86%

D. ANALISIS MODAL KERJA

Berdasarkan data dalam laporan keuangan, maka dapat dihitung modal kerja pemerintah daerah sebagai berikut :

MODAL KERJA = ASET LANCAR – KEWAJIBAN LANCAR
= 263.429.844.043,91 - 63.380.006.595,68
= 200.049.837.448,23

Nilai modal kerja tersebut berarti pada akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 modal kerja pemerintah daerah adalah sebesar Rp 200.049.837.448,23. Artinya modal kerja tersebut sudah cukup besar jika dibandingkan dengan utang lancar yang hanya sebesar Rp 63.380.006.595,68

E. ANALISIS PERTUMBUHAN UTANG

Tabel 5. Pertumbuhan Utang

	2022	2021	SELISIH	Dalam %
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	49.981.107,00	187.583.216,81	(137.602.109,81)	-73,36%
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	21.229.282.428,00	21.229.285.826,75	(3.398,75)	0,00%
Pendapatan Diterima Dimuka	146.306.800,00	11.848.916,00	134.457.884,00	1134,77 %
Utang Belanja	41.711.601.764,68	0,00	41.711.601.764,68	-
Utang Jangka	0,00	16.867.640.949,14	(16.867.640.949,14)	-100,00%

Pendek Lainnya				
Kewajiban- Penerimaan Kas Yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya	242.834.496,00	205.343.076,00	37.491.420,00	18,26%
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	63.380.006.595,68	38.501.701.984,70	24.878.304.610,98	64,62%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri – PP	40.876.606.144,00	62.105.885.173,25	(21.229.279.029,25)	-34,18%
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	40.876.606.144,00	62.105.885.173,25	(21.229.279.029,25)	-34,18%
JUMLAH KEWAJIBAN	104.256.612.739,68	100.607.587.157,95	3.649.025.581,73	3,63%

Berdasarkan data diatas dapat terlihat bahwa jumlah kewajiban secara total meningkat relative sebesar 3,67% atau sebesar 3.649.025.581,73 tetapi yang perlu mendapat perhatian adalah terjadi peningkatan bagian pendapatan diterima dimuka sebesar 1134,77%. Ini menggambarkan bahwa pendapatan diterima dimuka yang sudah ada memberi beban tambahan keuangan sehingga mungkin inilah alasan kenapa pemerintah daerah mengurangi bagian utang dalam negeri sekitar 34,18%.

ANALISIS ARUS KAS

Kinerja keuangan daerah juga dapat dilihat dari Arus Kas yang dihasilkan pemerintah daerah. Berdasarkan Laporan Arus Kas dapat diringkaskan dan dihitung Arus Kas beban yang dimiliki :

Pertumbuhan Arus Kas

Tabel 6. Pertumbuhan Arus Kas

Arus Kas Bersih	2021	2022	Pertumbuhan
Arus Kas Bersih dari aktiva operasi	219.852.420.201,03	135.968.021.930,03	-38,15%
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(319.531.266.315,18)	(258.905.413.177,79)	-18,97%
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	0,00	(21.229.282.428,00)	
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	(62.374.844,06)	(187.714.166,39)	200,95%
Kenaikan/penurunan kas	(99.741.220.958,21)	(144.154.387.842,15)	
Saldo awal kas	314.329.953.644,97	214.588.732.686,76	
Saldo akhir kas	214.588.732.686,76	70.234.344.844,61	

Dengan melihat pertumbuhan arus kas selama dua tahun terakhir, secara sekilas dapat ditangkap sinyal adanya penurunan kinerja keuangan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, meskipun secara keseluruhan masih dalam kategori sehat. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Arus kas operasi selama tahun 2021 dan 2022 bersaldo positif, ini merupakan hal yang bagus yang menunjukkan tidak adanya kesulitan keuangan pemerintah daerah. Namun jika dilihat dari pertumbuhannya justru negatif, yaitu -38,15%. Pada tahun 2022 terjadi penurunan arus kas sebesar Rp83.884.398.271,00 dari tahun sebelumnya. Hal ini kurang bagus, sebab diharapkan pertumbuhan arus kas operasi positif yang berarti ada peningkatan dari tahun ke tahun, bukan justru sebaliknya menurun.
2. Arus kas investasi selama tahun 2021 dan 2022 bersaldo negatif, yang artinya pemerintah daerah selama dua tahun tersebut aktif melakukan pembangunan fisik dalam bentuk investasi aset tetap yang ditandai dengan telah terjadinya pengeluaran kas untuk belanja modal yang lebih besar dibandingkan penerimaan kas dari penjualan aset tetap. Pertumbuhan arus kas investasi yang besar bisa berarti bagus tetapi bisa

juga kurang bagus tergantung dari besarnya peningkatan serta keseimbangan arus kas yang lain. Arus kas investasi pada tahun ini akan mempengaruhi arus kas bersih investasi tahun depan. Jika pada tahun ini arus kas investasi besar, maka arus keluar kas pada aktivitas operasi akan naik sehingga bisa berakibat jumlah arus kas bersih operasi lebih rendah jika tidak terjadi peningkatan pendapatan daerah yang signifikan.

3. Berdasarkan informasi Laporan Arus Kas, jika dilihat tampak bahwa pada tahun 2022 telah terjadi penurunan arus kas investasi, yaitu menurun sebesar 60.625.853.137,39 atau 18,97% dari tahun 2021.
4. Arus kas dari aktivitas pendanaan bersaldo negatif untuk tahun 2022, pada tahun 2021 arus kas dari aktivitas pendanaan bersaldo 0. Pada tahun 2022 nilai nya bersaldo negatif yaitu sebesar 21.229.282.428,00. Hal ini dapat menunjukkan perubahan dalam aktivitas pendanaan perusahaan. Saldo negatif pada arus kas pendanaan menunjukkan bahwa perusahaan mungkin sedang berupaya melunasi utang atau melakukan aktivitas pendanaan yang lebih besar dari penerimaan.
5. Arus kas dari aktivitas transitoris bersaldo negatif baik untuk tahun 2021 maupun tahun 2022, hal ini menandakan bahwa adanya pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan. Pada tahun 2022 nilai nya lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal itu mengidentifikasi adanya peningkatan kegiatan transitoris, seperti investasi atau pendanaan yang mengakibatkan pengeluaran kas yang lebih besar dari pada pendapatan yang dihasilkan.
6. Jika dilihat dari kenaikan/penurunan kas selama tahun 2021 dan 2022 bersaldo negatif. Hal itu tidak bagus bagi kesinambungan fiskal pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa entitas tersebut mengeluarkan lebih banyak kas dari pada yang diterima. Pada tahun 2022 menunjukkan bahwa bersaldo negatif lebih besar dibandingkan dengan tahun berikutnya. Hal ini mengidentifikasi adanya potensi masalah likuiditas. Saldo kas yang menurun dapat mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan dan menyediakan layanan publik.

Arus Kas Bebas (Free Cash Flow)

ARUS KAS BEBAS Tahun 2021 dan 2022

Tabel 7. Arus Kas Bebas tahun 2021 dan 2022

	2021	2022	Naik/(turun)
Kas dari operasi	219.852.420.201,03	135.968.021.930,03	(83.884.398.271,00)
Belanja modal	319.197.803.841,74	258.591.168.249,00	(60.606.635.593)
Arus kas bebas	(99.345.383.640,71)	(122.623.146.318,97)	(23.277.762.678,00)

Pada prinsipnya semakin besar arus kas bebas, maka hal itu semakin baik bagi organisasi karena berarti tidak ada masalah likuiditas yang melilit organisasi. Berdasarkan informasi dalam laporan arus kas, arus kas bebas untuk tahun 2021 dan 2022 semuanya bersaldo negatif, jumlah nya semakin meningkat pada tahun 2022 yang peningkatannya mencapai 23,43%. Hal ini mengidentifikasi adanya kekurangan kas yang semakin memburuk juga menunjukkan adanya masalah likuidasi dan kinerja keuangan yang tidak baik.



BAB 4

ANALISIS ASET RASIO KEUANGAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAERAH

Disusun oleh:

Muhammad Akbar Tarigan

Muhammad Dhafaruddin

Nurfatimah Nasution

Talitha Saphira Zahiroh

Yudha Handinata Hutabarat



BAB 4 ANALISIS ASET RASIO KEUANGAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAERAH

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, dan pasal 31 UUD No. 17 Tahun 2010, Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Kota DKI Jakarta Tahun Anggaran 2011 yang telah disusun oleh Pemerintah Kota DKI Jakarta. Laporan Keuangan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Kota DKI Jakarta, tanggung jawab BPK-RI terletak pada pernyataan pendapat atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 berdasarkan pemeriksaan BPK-RI. Pemeriksaan atas laporan Keuangan Daerah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit Pemeriksaan (SAP) yang ditetapkan oleh BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan BPK-RI untuk merencanakan, mengumpulkan bukti yang cukup dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai sebagai dasar untuk memberikan pendapat.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011 bertujuan untuk memberikan keyakinan apakah Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 telah disajikan secara wajar sesuai Prinsip Akuntansi yang ditetapkan di dalam Peraturan Perundangan yang berlaku. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 meliputi pengujian atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran Tahun 2004, Neraca per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Aliran Kas Tahun Anggaran 2011, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

B. NERACA ANALISIS ASET

NERACA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PER 31 DESEMBER 2011 DAN 2010

URAIAN	JUMLAH (Rp)		NAIK (TURUN)	% NAIK (TURUN)
	31 DESEMBER 2011	31 DESEMBER 2010		
ASET				
Aset Lancar				
Kas di Kas Daerah	6,604,170,595,035.00	5,149,410,691,628.00	1,454,759,903,407.00	28.25%
Kas di Bendahara Pengeluaran	63,322,260,315.00	47,195,181,722.00	16,127,078,593.00	34.17%
Kas di Bendahara Penerimaan	471,150,214,490.00	359,983,830,423.00	111,166,384,067.00	30.88%
Piutang Pajak	318,360,404,837.00	270,137,069,957.00	48,223,334,880.00	17.85%
Piutang Retribusi	52,164,511,797.00	113,747,162,263.00	(61,582,650,466.00)	-54.14%
Piutang Dana Bagi Hasil	-	63,460,296,760.00	63,460,296,760.00	100.00%
Piutang Tuntutan Ganti Rugi	6,010,554,773.00	14,553,317,787.00	(8,542,763,014.00)	-58.70%
Piutang Kerjasama/Pemanfaatan Aset	17,433,576,963.00	12,660,935,779.00	4,772,641,184.00	37.70%
Piutang Penjualan Barang Bergerak/Kendaraan	647,865,846.00	1,077,567,683.00	(429,701,837.00)	-39.88%
Piutang Tagihan Aset Kredit Ex BPPN	82,806,023,066.00	86,831,790,551.00	(4,025,767,485.00)	-4.64%

Piutang Penjualan Saham	47,871,975.00	6,005,000,000.00	(5,957,128,025.00)	-99.20%
Piutang Lainnya	360,736,484,563.00	391,446,311,001.00	(30,709,826,438.00)	-7.85%
Persediaan	530,477,129,539.00	359,914,727,571.00	170,562,401,968.00	47.39%
Jumlah Aset Lancar	8,507,327,493,199.00	6,876,423,883,125.00	1,630,903,610,074.00	23.72%
Investasi Jangka Panjang				
Investasi Nonpermanen	836,797,591,237.00	832,473,068,615.00	4,324,522,622.00	0.52%
Investasi Permanen	5,187,158,099,549.00	5,014,135,295,018.00	173,022,804,531.00	3.45%
Jumlah Investasi Jangka Panjang	6,023,955,690,786.00	5,846,608,363,633.00	177,347,327,153.00	3.03%
Aset tetap				
Tanah	280,270,515,025,054.00	324,425,352,369,781.00	(44,154,837,344,727.00)	-13.61%
Peralatan dan Mesin	11,292,005,795,458.00	8,875,908,865,229.00	2,416,096,930,229.00	27.22%
Gedung dan Bangunan	17,708,599,595,514.00	16,274,161,176,936.00	1,434,438,418,578.00	8.81%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	21,875,489,499,979.00	20,757,902,864,604.00	1,117,586,635,375.00	5.38%
Aset Tetap Lainnya	1,326,742,286,822.00	1,053,027,313,008.00	273,714,973,814.00	25.99%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2,597,885,783,289.00	1,050,709,756,741.00	1,547,176,026,548.00	147.25%
Jumlah Aset tetap	335,071,237,986,116.00	372,437,062,346,299.00	(37,365,824,360,183.00)	-10.03%
Dana Cadangan	791,015,263,995.00	738,879,058,817.00	52,136,205,178.00	7.06%
Aset Lainnya				
Tagihan Penjualan Angsuran	37,890,238,255.00	5,472,077,262.00	32,418,160,993.00	592.43%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3,160,513,773,625.00	3,203,396,892,190.00	(42,883,118,565.00)	-1.34%
Aset tidak berwujud	13,192,113,229.00	8,783,701,766.00	4,408,411,463.00	50.19%

DAFTAR PUSTAKA

- Collier, P. M. (2003). *Accounting for Managers: Interpreting Accounting Information for Decision Making*. UK: *John Wiley & Sons Ltd*.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Henley D, A. L. (1992). *Public Sector Accounting and Financial Control*. 4th Ed. London: *Chapman & Hall*.
- IFAC. (2000). *Governmental Financial Reporting: Accounting Issues and Practice*.
- Jones, B. M. (1995). *Local Government Financial Management*, UK:ICSA Publisihing.
- K G Palepu, P. M. (2000). *Business Analysis and Valuations Using Financail Statement*. 2nd Ed Ohio: *South-Western College Publishing*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: *Andi*.
- Pendlebury, R. J. (2000). *Public Sector Accounting*. 5th Ed London: *Financial Times - Prentice Hall* .
- Razek J R, G. A. (2000). *Introduction to Governmental and Not-for-Profit Accounting*. 4th Ed Upper Saddle River, NJ: *Prentice Hall*.
- Republik Indonesia, Pemendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.).
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan. (n.d.).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (n.d.).
- Republik Indonesia, Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (n.d.).

Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (n.d.).

Republik Indonesia, Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (n.d.).

Suwardjono. (2003). Akuntansi Pengantar: Proses Penciptaan Data Pendekatan Sistem. *Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.*

Suwardjono. (2005). Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan keuangan. *Edisi Ketiga, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.*

White G I, S. A. (1997). The Analysis and Use of Financial Statements. *2nd Edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.*



IKAPI
INATAN PENGIRI INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996



62-415-3817-776